

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bahkan dapat dikatakan determinan dalam pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai demokrasi. Kegagalan demokrasi Indonesia selama ini disinyalir salah satunya disebabkan oleh disorientasi pendidikan dan paradigma yang salah dalam proses pendidikan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan yang berlangsung selama ini hanya diartikan sebagai ditransfer dalam pembelajaran atau diajarkan dan kurang dipraktikkan dalam realitas sosial.

Pendidikan kita, termasuk juga di perguruan tinggi, masih belum beranjak dari paradigma pendidikan sebagai *transfer of knowledge* semata. Implikasinya adalah konstruk pembelajaran di kelas dibangun pada asumsi-asumsi konservatif, seperti dosen adalah “manusia yang paling tahu”, mahasiswa hanya mencatat dan belajar berdasarkan apa yang disampaikan oleh dosen, dan seterusnya. Problem paradigma ini berbuntut pada problem metodologis. Dan belum terselesaikan dalam dunia pendidikan kita.

PKn adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan proses seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation*, serta kemampuan untuk mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri tapi juga

masyarakat. Oleh karena itu *out come* dari PKn bagi bangsa Indonesia adalah menyangkut pengetahuan, sikap mental nilai-nilai dan perilaku yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga akan terwujud warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat dan sejahtera serta demokratis.

Perguruan tinggi dari perspektif politik merupakan suatu lembaga yang diharapkan sebagai media rekrutmen, seleksi, dan pendidikan warga bangsa untuk memasuki kelompok elit politik. Cepat atau lambat elit politik masyarakat dan politisi Indonesia akan merupakan lulusan lembaga tinggi. Dalam tindakan yang rasional tersebut diharapkan keputusan yang diambil akan mendatangkan keuntungan tidak saja bagi diri dan keluarga tapi juga seluruh masyarakat dan bangsa. Dengan kalimat singkat, PKn di perguruan tinggi harus mampu menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis dan bertindak demokratis. Menjadi bangsa yang "mudah dipimpin tetapi sulit untuk dikendalikan, mudah diperintah tetapi juga sulit untuk diperbudak" (Zamroni, 2003 :10)

Gambaran di atas memperlihatkan permasalahan pembelajaran tradisional pada lembaga-lembaga pendidikan di negara kita. Belum lagi penilaian tradisional yang bersifat sesaat. Karena sampai saat ini sistem penilaian kita di perguruan tinggi baru sekedar meliputi tiga komponen yaitu tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan model penilaian berbasis portofolio memiliki empat prinsip dasar yaitu prinsip penilaian proses dan hasil, penilaian berkala dan sinambung, penilaian yang adil dan penilaian implikasi sosial belajar. Seorang dosen, menurut Pannen dan Melati (1997:15) perlu meyakinkan bahwa

program yang akan disajikan dalam proses belajar sudah memenuhi asumsi dasar sebagai berikut :

1. mahasiswa sebagai orang dewasa mampu mengarahkan diri sendiri dalam belajar (*self-directing*).
2. mahasiswa sebagai orang dewasa mempunyai pengalaman hidup yang sangat kaya yang merupakan sumber belajar yang berharga.
3. mahasiswa sebagai orang dewasa cenderung lebih berminat pada proses belajar mengajar yang berhubungan dengan penyelesaian masalah dan tugas-tugas yang dihadapinya.

Menurut Internasional Commission of Jurrits (2003), kita kurang berhasil menyelenggarakan PKn seperti diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isi maupun cara penyampaiannya sangat tidak memuaskan. Isinya hanya mencatat hal-hal yang baik-baik, cara penyampaiannya pun searah, bahkan indoktrinatif. Padahal salah satu syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis ialah adanya PKn (civics). Sedangkan menurut Azra (2003:10), kegagalan dalam usaha sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi untuk pembentukan cara berpikir (*world view*) dan perilaku demokrasi di lingkungan pendidik dan masyarakat sekolah/universitas umumnya besumber dari tiga hal. *Pertama*, secara substantif, PKn, Pancasila dan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif, *Kedua*, walaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi Pendidikan Demokrasi dan PKn, potensi itu tidak berkembang, karena pendekatan dan pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis dan tidak partisipatif. *Ketiga*, ketiga subjek itu lebih teoritis daripada praktis. Akibatnya

terdapat diskrepansi yang jelas diantara teori dan wacana 45 yang dibahas dengan realitas sosial politik yang ada. Bahkan pada tingkat sekolah/universitas sekalipun, diskrepansi itu sering pula terlihat dalam bentuk otoritanisme bahkan feodalisme orang-orang sekolah dan universitas itu sendiri. Akibatnya bisa dipahami, kalau sekolah/universitas gagal untuk membawa peserta didik untuk “mengalami demokrasi”.

Berdasarkan uraian dan pengalaman di atas, perlu diadakan pembaharuan dalam proses pembelajaran PKn di perguruan tinggi, salah satunya adalah pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio, karena berdasarkan pengalaman empirik peneliti dan juga survei awal peneliti, menunjukkan bahwa para dosen PKn di Universitas Muhammadiyah Purwokerto selama ini masih menerapkan sistem pembelajaran konvensional. Hal ini bisa saja terjadi karena masih adanya keraguan pengaruh/manfaat terhadap model pembelajaran PKn dengan berbasis portofolio, serta belum adanya penelitian terhadap masalah ini di tingkat perguruan tinggi. Padahal model pembelajaran berbasis portofolio memiliki prinsip dasar yang kuat seperti prinsip belajar siswa aktif, kelompok belajar kooperatif, pembelajaran partisipatorik, dan *reactive teaching* (Budimansyah. 2002:v). Di samping itu, model pembelajaran ini memiliki landasan pemikiran yang kuat, yaitu membelajarkan kembali (*Re-dukasi*), dan merefleksi pengalaman belajar. Zuriyah(2003:2) menguatkan, bahwa model pembelajaran berbasis portofolio memungkinkan mahasiswa untuk : 1) berlatih memadukan antara konsep/teori yang diperoleh dari penjelasan dosen atau dari buku referensi dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2).

mahasiswa diberi kesempatan untuk mencari informasi di luar kelas/kampus baik informasi yang sifatnya benda/bacaan, penglihatan objek langsung, TV/radio/internet maupun orang/pakar/tokoh, 3) membuat alternatif untuk mengatasi topik/objek yang dibahas, 4) membuat suatu keputusan (sesuai kemampuannya) yang berkaitan dengan konsep yang telah dipelajarinya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan 5) merumuskan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di beberapa negara menyimpulkan,

“Secara umum pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di beberapa negara mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianutnya. Oleh karenanya, apa pun bentuk pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di beberapa negara, hendaknya nilai-nilai fundamental dari masyarakat itu perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan sosial, agar nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan problem suatu masyarakat” (Chamim *et al*, 2003 : xxxvii).

Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di Indonesia seharusnya juga mampu menemukan kembali relevansi nilai-nilai fundamental masyarakat dengan dinamika sosial yang berubah secara cepat. Dalam konteks Indonesia, sesungguhnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia menurut Chamim *et al* (2003: xxxiv), lebih progresif dalam pengembangan *civic education*, karena mereka sudah cukup lama melakukan upaya pengembangan *civic education* dengan menggunakan *separated approach* melalui mata pelajaran atau matakuliah khusus, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Matakuliah Dasar Umum (MKDU) Pancasila dan Kewiraan, bahkan Penataran P4.

Secara jujur harus diakui, bahwa terdapat sejumlah masalah dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan selama ini dalam lembaga pendidikan di Indonesia, sehingga mengakibatkan kegagalan yang cukup serius dalam upaya sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi dalam pembentukan cara berpikir (*world-view*) dan perilaku demokrasi di lingkungan peserta didik dan masyarakat sekolah/universitas pada umumnya. Kegagalan itu setidaknya bersumber pada tiga hal, yaitu :

1. Secara substantif Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Matakuliah Dasar Umum (MKDU) Pancasila dan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewargaan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang bersifat idealistik, legalistik dan normative, bahkan cenderung menggunakan perspektif militerisme.
2. Kalaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan, potensi tersebut tidak bisa berkembang, karena pendekatan dalam pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regementatif, monologis, dan tidak partisipatif.
3. Materi-materi perkuliahan tersebut lebih teoritis daripada praktis. Akibatnya terdapat diskrepansi yang jelas di antara teori/wacana yang dibahas dengan realitas social-politik yang berlangsung. Bahkan, pada tingkat sekolah / universitas sekalipun, diskrepansi itu sering terlihat pula dalam bentuk otoritarianisme, bahkan feodalisme, dari para pejabat di sekolah dan

universitas itu sendiri. Akibatnya bisa dipahami bahwa sekolah atau universitas gagal membawa peserta didik untuk "mengalami demokrasi".

Terjadinya kegagalan seperti disebutkan di atas, kiranya sudah sangat mendesak diadakannya perubahan paradigma dalam PKn yang dikembangkan pada lembaga pendidikan. Di samping perubahan paradigma dalam bidang materi, tidak kalah pentingnya perubahan dalam bidang paradigma metodologis. Apabila perubahan pada paradigma yang pertama diarahkan secara sistematis pada pengembangan wacana demokrasi yang berkeadaban dalam dinamika perubahan sosial yang berkembang, maka perubahan paradigma metodologis diarahkan untuk mengembangkan daya nalar peserta didik dalam kelas-kelas yang partisipatif, sehingga peserta didik benar-benar dapat "mengalami demokrasi" dalam proses pembelajaran PKn. Zamroni (2003:11) berpendapat,

"Upaya mewujudkan suatu masyarakat dan pemerintahan yang demokratis maka kesempatan warga untuk berkelompok dan berpartisipasi dalam kehidupan politik haruslah secara luas didorong dan diberikan fasilitas. Untuk mempersiapkan warga masyarakat, khususnya generasi baru agar berperan dan memberikan kontribusi dalam kehidupan politik yang demokratis, generasi baru memerlukan pengalaman interaksi *face to face* yang terorganisir sehingga bermakna bagi mereka. Mereka ini harus memiliki kesempatan untuk mengambil peran dari kelompok-kelompok terorganisir dan melakukan kegiatan untuk kemajuan umum. Kelompok-kelompok ini membiasakan mereka dalam kerja sama yang saling menguntungkan, saling hormat-menghormati, dan saling percaya mempercayai baik sesama warga kelompoknya, maupun warga antar kelompok. Generasi baru ini harus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan guna mempersiapkan diri mereka memahami dan berpartisipasi dalam sistem politik yang ada".

Salah satu kelemahan mekanisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokrasi di Indonesia adalah ketidakmampuan di dalam mengembangkan interaksi yang bebas dan terbuka antara berbagai unsur yang tumbuh dan



berkembang dalam masyarakat yang heterogen dalam arti masyarakat yang pluralistik dalam multi kulturalisme dan multi-etnosentrisme melalui kebijakan yang lebih ditekankan pada aspek “ke-ekaan” daripada aspek “kebhinekaannya” (Siswomihardjo,1998:10).

Hambatan dan permasalahan lain menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2002:3) adalah adanya tanggapan kurang simpatik masyarakat kampus (civitas akademika) terutama mahasiswa terhadap matakuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (yang selanjutnya disebut PKn) sebagai akibat proses pendidikan tiga dasawarsa terakhir yang bersifat indoktrinasi sehingga isi, makna, dan manfaat yang diperoleh dari mempelajari ketiga matakuliah tersebut tidak terasa.

Penghargaan perguruan tinggi terhadap dosen pengampu matakuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan PKn (kebanyakan) masih dirasa kurang, atau diperlakukan berbeda dengan dosen matakuliah-matakuliah lain. Jumlah mahasiswa “baru” yang terus bertambah sesuai dengan pembukaan program studi maupun perguruan tinggi baru, sehingga jumlah dosen PKn yang diperlukan sulit ditentukan secara pasti.

Upaya pembangunan masyarakat sipil yang kuat diperlukan PKn. Secara prinsip, PKn akan mengajarkan bagaimana memberdayakan peran yang lebih besar pada individu sebagai warga negara. PKn berusaha menerapkan pendekatan yang sangat tepat untuk bisa mengembangkan pengetahuan yang menjunjung sikap kewarganegaraan pada seorang individu.

Pendidikan demokrasi dalam PKn dilaksanakan melalui pengembangan pada tiga aspek. *Pertama*, kecerdasan dan daya nalar warga negara (*civic intelligence*), baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. *Kedua*, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*). *Ketiga*, kemampuan berpartisipasi warga negara (*civic participation*) atas dasar tanggung jawab, baik secara individual, secara sosial, maupun sebagai pemimpin masa depan. Berkaitan dengan pendidikan demokrasi Winataputra (2003) menyatakan,

“Secara umum, PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan setiap individu memiliki wawasan, watak, serta ketrampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Oleh karena itu, bahwa dalam setiap jenjang pendidikan diperlukan PKn yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan pelatihan ketrampilan intelektual. Proses ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bekal bagi peserta didik untuk berperan dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungannya”.

Menurut Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2002:xvii), Civic Education merupakan salah satu upaya pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan seseorang menjadi warganegara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu fokus utama pencapaian tujuan pembelajaran PKn yang dikembangkan dalam PKn adalah terbentuknya perilaku (sikap).

Keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan, manusia tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual saja, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan



Oleh karena itu sangat perlu diberikan bekal kepada para mahasiswa melalui kegiatan PKn di perguruan tinggi, yang lebih menekankan pada ranah afektif. Lebih-lebih bahwa mahasiswa adalah merupakan calon-calon kader penerus bangsa. Mahasiswa merupakan pemuda terpilih yang diandalkan oleh bangsa dan negara. Maka tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa "masa depan bangsa dan negara berada di pundak generasi muda " terlebih khusus mahasiswanya. Dan memang dalam sejarah tercatat bahwa pemuda dan mahasiswa senantiasa menjadi motor penggerak dalam berbagai peristiwa penting seperti Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan lain sebagainya.

Saat ini bangsa Indonesia sedang membangun, menuju suatu cita-cita suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual, modernisasi dan industrialisasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan dengan menempatkan sains dan teknologi sebagai tulang punggungnya. Perkembangan ini di samping banyak membawa manfaat ternyata juga menyertakan akses kemudaran bagi umat manusia. Kemajuan sains dan teknologi memang telah mampu semakin membuka lebar rahasia alam semesta. Komunikasi makin mendekatkan pemahaman dan saling pengertian antar berbagai kebudayaan, tata nilai dan norma. Akan tetapi sebaliknya gerak kemajuan dan modernisasi rupanya juga membawa limbah peradaban yang dapat mencemari akhlak manusia. Kemajuan ini ternyata juga sarat beban pergeseran tata nilai yang dapat menjerumuskan.

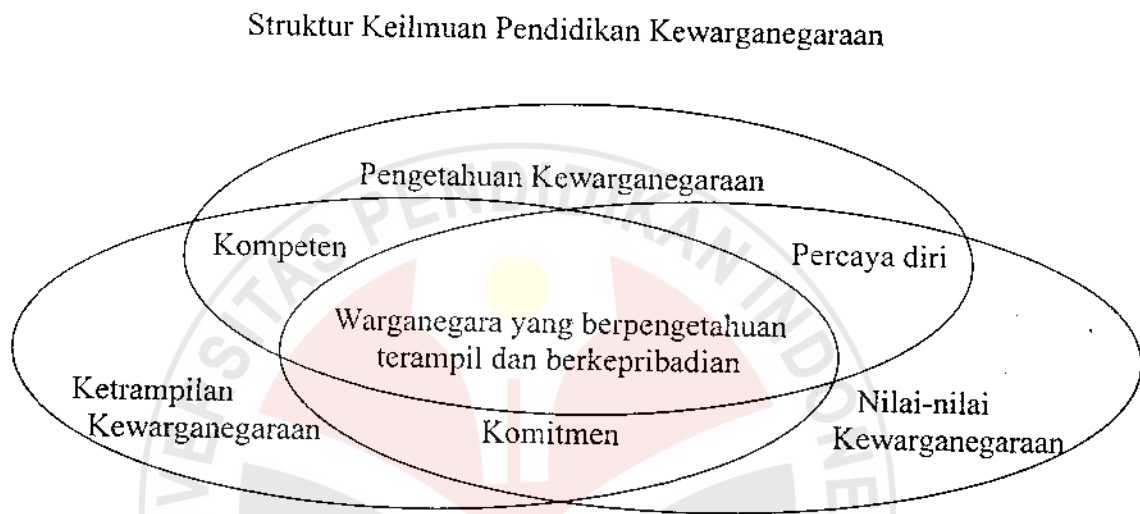
Industrialisasi sendiri juga banyak membawa berbagai perubahan pada banyak aspek kehidupan manusia. Perubahan cara kerja, gaya hidup, tata ekonomi dan kebijakan politik pada akhirnya membawa pula dampak sosial yang sulit diperkirakan. Di antara berbagai kecenderungan sosial pada era ini yang menonjol adalah berkembangnya orientasi yang berlebihan terhadap materi (fasilitas) berikut konsumerismenya, yang tidak terkendali, yang tentunya dapat menggoncang keseimbangan antara orientasi keduniaan dan keakhiratan. Tidak sedikit masyarakat yang telah terperangkap ke dalam arus materialisme, hidonisme, individualisme, sekularisme, dan sebagainya. Dan sebagai salah satu usaha preventifnya adalah melalui PKn.

Proses globalisasi dewasa ini semakin meningkat, maka dituntut persiapan pemberdayaan sumberdaya manusia Indonesia. Untuk menghadapi hal tersebut dengan penuh persiapan dan kematangan. Karena globalisasi juga identik dengan era persaingan bebas. Sehingga, sebuah negara itu menjadi miskin atau terbelakang, bukanlah karena kekurangan sumberdaya alam, tetapi negara menjadi miskin dan terbelakang adalah karena kekurangan sumberdaya manusia yang berkualitas. Bukti empiris adalah Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya.

Sudah tidak dapat dielakkan dan ditawar-tawar lagi, bahwa pendidikan yang mapan menjadi sesuatu yang patut untuk mendapat perhatian. Karena untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sebagian besar lewat pendidikan. Oleh karena itu, sepanjang pendidikan masih bersifat sempit (*parochial*), maka sulit diharapkan untuk dapat membangun sumberdaya manusia

yang mampu bersaing di masyarakat global. Standar nasional bahkan internasional pendidikan merupakan suatu keharusan. Hanya pendidikan dengan kualitas yang sangat baik yang mampu mengantar individu di suatu negara mana pun mampu bersaing dalam era global, tanpa rasa khawatir dan cemas.

Sebagai gambaran, struktur keilmuan PKn digambarkan seperti berikut :



Gambar 1 Struktur Keilmuan PKn
Adaptasi : Departemen Pendidikan Nasional 2003:3

B. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah pembelajaran PKn di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang meliputi: a) tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran PKn, (b) sikap demokratis mahasiswa, (c) akhlak mahasiswa, (d) tanggapan mahasiswa terhadap pentingnya integritas nasional, (e) kesadaran mahasiswa terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga

negara, (f) tanggapan mahasiswa terhadap hak asasi manusia; dan (g) prestasi belajar PKn. Jadi secara garis besar, penelitian ini mengungkap sejauh mana perbedaan peningkatan yang diperoleh mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran PKn yang menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran PKn yang menggunakan model pembelajaran konvensional.

Selama ini pembelajaran PKn belum dilaksanakan secara baik, karena lebih memfokuskan pada pendidikan bela negara (terutama ketika berupa Pendidikan Kewiraan), padahal nilai-nilai kewarganegaraan tidak sesederhana mendidik bela negara, walaupun bela negara itu juga perlu bagi warga negara. Padahal kemampuan warga negara suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air, bersendikan budaya bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kepada para mahasiswa calon ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang mengkaji dan akan menguasai iptek dan seni, menjadi tujuan utama pendidikan kewarganegaraan. Kualitas warganegara akan ditentukan

terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di samping derajat penguasaan iptek yang dipelajarinya.

Setidaknya terdapat delapan fenomena patologi sosial yang tersisa dari proses transisi, yaitu hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas, kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat, memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong-menolong, melemahnya nilai-nilai dalam keluarga, praktek korupsi, kolusi, nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan (Cipto et al, 2002:ii-v).

Melalui PKn, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada saatnya dapat menghayati hakikat konsepsi wawasan nusantara dan ketahanan nasional, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia yang patriotik dan cinta tanah air dalam melaksanakan profesinya.

Diharapkan pula melalui PKn anak didik (mahasiswa) akan menjadi manusia warganegara Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya. Didambakan bahwa warga negara Indonesia unggul dalam penguasaan iptek dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya dan apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya.

PKn yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
- b. Bebudi pekerti luhur, disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- d. Bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
- e. Aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara (Kep. Ditjen Dikti No 267/Dikti/Kep/2000)

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini khususnya dalam pembelajaran PKn pada Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester gasal tahun akademik 2004-2005 dirumuskan sebagai berikut :

1. Adakah perbedaan yang signifikan tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran PKn antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.
2. Adakah perbedaan yang signifikan sikap demokratis antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.

3. Adakah perbedaan yang signifikan akhlak antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.
4. Adakah perbedaan yang signifikan tanggapan mahasiswa terhadap pentingnya integritas nasional antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.
5. Adakah perbedaan yang signifikan kesadaran sikap tentang hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.
6. Adakah perbedaan yang signifikan tanggapan tentang HAM antara mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.
7. Adakah perbedaan yang signifikan prestasi hasil belajar PKn antara mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran berbasis portofolio dalam mata kuliah PKn, mengembangkan model pembelajaran berbasis portofolio dalam pembelajaran PKn di perguruan tinggi sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan mahasiswa pada era global, sehingga dapat mengembangkan nilai-nilai demokrasi, akhlak mulia, integritas nasional, hak dan kewajiban sebagai warganegara, nilai-nilai HAM, dan tanggung jawab di kalangan mahasiswa sebagai warga masyarakat, warga negara dan warga dunia.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran berbasis portofolio dalam pembelajaran PKn mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester gasal tahun akademik 2004-2005. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

- a. Perbedaan tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran PKn antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.
- b. Perbedaan sikap demokratis antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.

- c. Perbedaan akhlak antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.
- d. Perbedaan tanggapan mahasiswa terhadap pentingnya integritas nasional antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.
- e. Perbedaan kesadaran sikap tentang hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.
- f. Perbedaan tanggapan tentang HAM antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan tidak menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio.
- g. Perbedaan prestasi hasil belajar PKn antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan PKn dengan metode pembelajaran konvensional.

E. Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan dalam suatu penelitian merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan telaah masalah yang telah dirumuskan.

Hakekatnya, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan telaah teoritis yang telah dilakukan. Hipotesis yang ditetapkan merupakan kalimat terbuka. Gagal diterima atau dapat diterimanya hipotesis tergantung pada fakta empiris. Diterima atau tidak diterimanya suatu hipotesis sama sekali bukan justifikasi dari penelitiannya., melainkan ditentukan oleh fakta yang diperoleh dari analisis data yang memenuhi persyaratan metodologis. Dalam penelitian kuantitatif, mengajukan hipotesis selain memberikan arahan kepada penelitiannya untuk melakukan kegiatan berikutnya, juga bermanfaat sebagai landasan untuk melakukan deduksi.

McMillan dan Schumacher (2001:89-90) mengemukakan adanya empat kriteria dalam rumusan hipotesis, yaitu :1) hipotesis yang dirumuskan hendaklah merupakan pernyataan tentang hubungan antardua variabel atau lebih; 2) hipotesis yang dirumuskan harus dapat diuji; 3) hipotesis yang dirumuskan harus memberi isyarat penggunaan statistik; 4) hipotesis yang dirumuskan harus tidak memberi makna ganda.

Berdasarkan telaah teoritis dan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Ada perbedaan yang signifikan tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran PKn antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan dengan metode pembelajaran konvensional.
2. Ada perbedaan yang signifikan sikap demokratis mahasiswa antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran

berbasis portofolio dengan mahasiswa yang yang mendapat perkuliahan dengan metode pembelajaran konvensional.

3. Ada perbedaan yang signifikan akhlak mahasiswa antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang yang mendapat perkuliahan dengan metode pembelajaran konvensional.
4. Ada perbedaan yang signifikan tanggapan mahasiswa terhadap pentingnya integritas nasional antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang yang mendapat perkuliahan dengan metode pembelajaran konvensional.
5. Ada perbedaan yang signifikan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warganegara antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang yang mendapat perkuliahan dengan metode pembelajaran konvensional.
6. Ada perbedaan yang signifikan tanggapan mahasiswa terhadap HAM antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang yang mendapat perkuliahan dengan metode pembelajaran konvensional.
7. Ada perbedaan yang signifikan prestasi hasil belajar PKn antara mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio dengan mahasiswa yang yang mendapat perkuliahan dengan metode pembelajaran konvensional.



F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Secara substantif dan pedagogis, program *civic education* itu dirancang sebagai wahana pendidikan umum yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa agar dapat mengembangkan dirinya menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban atau “*smart and good citizen*”. Oleh karena itu dalam instrumentasi dan praksis pendidikannya secara programatik dikembangkan “*civic intelligence*” (kecerdasan warga negara) yang mencakup tiga hal, yaitu : “*civic knowledge*” (pengetahuan kewargaan) dan “*civic skill*” (ketrampilan kewargaan), dan “*civic dispositions*” (sikap kewargaan), serta difasilitasi terjadinya “*civic participation*” (partisipasi kewargaan) melalui berbagai interaksi pembelajaran yang bersifat partisipatif, kajian individual dan kelompok yang diakhiri dengan penilaian belajar yang berlandaskan pada penguasaan keseluruhan kompetensi kewargaan secara proporsional (Winataputra, 2000:viii).

Dengan penelitian penerapan model pembelajaran berbasis portofolio dalam mata kuliah PKn pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini diharapkan dapat diperoleh model pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang lebih mantap dalam rangka mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan agar mahasiswa menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Di samping itu diharapkan dapat mengembangkan model pembelajaran Pkn berbasis Portofolio pada tingkat perguruan tinggi, serta

perkuliahan PKn yang disesuaikan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan mahasiswa pada era global.

2. Manfaat Praktis

Kecuali manfaat teoritis, penelitian ini juga di harapkan memberikan manfaat praktis, yaitu :

- a. Memperbaiki tanggapan civitas akademika khususnya mahasiswa, terhadap mata kuliah PKn sehingga mata kuliah PKn lebih berdaya dan berhasil guna.
- b. Memanfaatkan hasil penelitian dengan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio dalam mata kuliah PKn di perguruan tinggi.
- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran PKn pada perguruan tinggi khususnya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan di seluruh Indonesia pada umumnya.
- d. Memberikan sumbang saran bagi lembaga-lembaga yang bergerak di dalam bidang penelitian dan pendidikan agar memperhatikan peran yang strategis dari PKn dalam rangka mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan agar mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban.

G. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Best (1977:82), variabel adalah kondisi-kondisi atau karakteristik-karakteristik yang oleh pengeksperimen dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasi. Variabel bebas (Independent Variable) ialah kondisi atau karakteristik yang oleh pengeksperimen dimanipulasikan di dalam rangka untuk

menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi. Sedangkan variabel tergantung (*dependent variable*) ialah kondisi atau karakteristik yang berubah, atau muncul, atau yang tidak muncul ketika pengeksperimen mengintroduksi, merubah atau mengganti variabel bebas.

Variabel bebas / *independent* pada penelitian ini adalah pembelajaran PKn dengan model pembelajaran berbasis portofolio, sedangkan variabel tergantungnya / *dependent* adalah hasil pembelajaran PKn mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester gasal tahun akademik 2004-2005 berupa perubahan perilaku dan sikap yang meliputi tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran PKn, sikap demokratis mahasiswa, akhlak mahasiswa, tanggapan mahasiswa terhadap pentingnya integritas nasional, kesadaran mahasiswa tentang hak dan kewajibannya sebagai warganegara, tanggapan mahasiswa tentang hak asasi manusia, prestasi hasil belajar tertulis mahasiswa, yang meliputi tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, peningkatan kualitas mahasiswa sebagai individu, peningkatan kualitas mahasiswa sebagai warga masyarakat, dan peningkatan kualitas mahasiswa sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab.

Penelitian eksperimen, selain harus memenuhi persyaratan seperti penelitian macam lain pada umumnya seperti : membandingkan dua kelompok atau lebih dan menggunakan ukuran-ukuran statistik tertentu (*statistika inferensial*) juga : 1) menyamakan dulu kondisi subjek yang dimasukkan ke dalam kelompok-kelompoknya. Biasanya dilakukan secara acak; 2) memanipulasikan secara

langsung satu variabel bebasnya (independent atau lebih); 3) melakukan pengukuran (sebagai hasil eksperimen) terhadap variabel-variabel bergantungannya (dependen); 4) adanya control terhadap variabel-variabel non – percobaan(extraneous variables) (Ruseffendi dan Sanusi, 1994 : 38).

Agar tidak terjadi kesalahfahaman, perlu diuraikan definisi operasional tentang variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sikap Manusia

a. Pengertian Sikap

Sikap atau *attitude* sudah sejak lama menjadi salah satu konsep yang dianggap paling penting dalam psikologi sosial khususnya dan dalam berbagai ilmu sosial umumnya (Azwar,1998: vii). Menurut Waren (1979:123) sikap adalah daya mental yang khusus untuk menanggapi berbagai pengalaman-pengalaman itu atau suatu kesiapan untuk melakukan kegiatan tertentu.

Soenarjanti (1987:80), mendefinisikan, bahwa sikap itu adalah kesiapan atau kecenderungan untuk (secara positif dan negatif) bertindak terhadap suatu objek dan terbentuk atas pengalaman. Walgito(1980:32), memberikan pengertian bahwa sikap adalah keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak, menyertai manusia dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi, dalam objek dan terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman. Sikap adalah sebagai suatu predisposisi atau kecendengan untuk melakukan suatu respon dengan cara-cara tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun obyek-obyek tertentu (Nurkencana dan Sumartana, 1986 :275).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, sikap adalah keadaan dalam diri manusia atau daya mental yang menggerakkan untuk menanggapi berbagai pengalaman dan bertindak dengan perasaan tertentu yang terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti yang berkaitan dengan sikap adalah tanggapan terhadap pembelajaran, sikap demokratis, akhlak, tanggapan terhadap integritas nasional, kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warganegara, dan tanggapan terhadap HAM. Untuk mengungkap sikap-sikap tersebut digunakan angket dan observasi.

b. Pengukuran Sikap Manusia

Azwar (1998:87) mengemukakan bahwa salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dan perilaku manusia adalah masalah pengukuran (*asseement*) atau pengukuran (*measurment*) sikap. Ada beberapa metode pengukuran sikap yang secara historik telah banyak dilakukan orang, antar lain observasi,penanyaan langsung,pengungkapan langsung, skala sikap, dan pengukuran terselubung. Dalam penelitian ini metode pengukuran sikap yang digunakan adalah skala sikap.

Skala sikap (*attitude scales*) adalah berupa kumpulan pernyataan-pernyataan mengenai suatu objek sikap. Dari respon subjek pada setiap pernyataan itu kemudian dapat disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang. Salah satu sifat skala sikap adalah isi pernyataan yang dapat berupa pernyataan langsung yang jelas tujuan ukurannya akan tetapi dapat pula berupa

pernyataan tidak langsung yang tampak kurang jelas tujuan ukurannya bagi responden. Walaupun responden dapat mengetahui bahwa skala tersebut bertujuan untuk mengukur sikap namun pernyataan tidak langsung ini biasanya tersamar dan mempunyai sikap proyektif. Respon individu terhadap stimulus (pernyataan-pernyataan) sikap yang berupa jawaban setuju atau tidak setuju itulah yang menjadi indikator sikap seseorang. Respon yang tampak, yang dapat diamati langsung dari jawaban yang diberikan seseorang, merupakan bukti satu-satunya yang dapat kita peroleh. Itulah yang menjadi dasar untuk menyimpulkan sikap seseorang mahasiswa.

2. Tanggapan

Pengertian tanggapan, menurut Kartono (1985:72) adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada, atau gambaran ingatan dari pengamatan. Tidak berbeda jauh dengan pendapat Rumiati (1984:), bahwa tanggapan adalah kenangan kepada pengamatan atau menimbulkan kembali kesan-kesan dari pengamat yang lampau. Sedangkan menurut Soemanto (1987:23), tanggapan adalah sebagai bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Kesan tersebut menjadi isi kesadaran yang dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan konteks pengalaman waktu sekarang serta antisipasi keadaan untuk masa yang akan datang.

Tanggapan juga berarti bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan, yaitu (1) cara tersedianya obyek disebut representasi, (2) objek tidak ada pada diri sendiri, tetapi ada / diadakan pada diri subjek yang

menganggap, (3) objek hanya ada pada dan untuk subjek yang menganggap, dan 4) terlepas dari unsur tempat dan keadaan waktu (Soerjabrata, 1984: 43).

Tanggapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester gasal tahun akademik 2004-2005 terhadap pembelajaran PKn, yang meliputi tanggapan mahasiswa terhadap pentingnya integrasi nasional, dan tanggapan mahasiswa terhadap HAM, setelah mereka memperoleh pengajaran PKn.

3. Sikap Demokratis

Berdasarkan rumusan Unesco (1998:56-57) masyarakat dunia sekarang telah menyaksikan bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang paling logis. Kecenderungan ini sudah menjadi lebih nyata di tahun-tahun sekarang ini. Demokrasi menambah pembangunan berbagai aspek potensi manusiawi melalui persamaan akses pada pendidikan dan peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Sudah tidak diragukan lagi, itu merupakan fondasi perdamaian abadi. Perdamaian, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan pembangunan berkelanjutan pada kenyataannya sangat terkait satu dengan yang lain. Tanpa yang satu yang lain tidak mungkin ada. Demokrasi tidak mungkin ada tanpa perdamaian, dan perdamaian yang sebenarnya tidak mungkin tanpa demokrasi.

Pendidikan demokratis menurut Zamroni (2001:8) adalah mendidik warga masyarakat agar gampang dipimpin tetapi sulit dipaksa, gampang diperintah tetapi sulit diperbudak. Sebagai warga dari masyarakat demokratis, masing-masing

warga dengan sukarela senantiasa taat pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Namun apabila undang-undang atau peraturan dilecehkan, mereka akan bangkit. Apalagi, kalau mereka dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Demikian pula reaksi spontan warga masyarakat akan muncul apabila justru penguasa sendiori yang dengan sengaja dan sadar melecehkan undang-undang atau peraturan yang ada..

Pendidikan demokrasi menekankan pada kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Kemandirian diperlukan untuk mengembangkan kepercayaan diri dan sekaligus kesadaran akan keterbatasan dan kemampuan individu, sehingga bekerja sama dengan warga lain merupakan keharusan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan memiliki makna perlu dikembangkannya visi kehidupan yang bertumpu pada kesadaran akan pluralitas masyarakat. Kehidupan pluralitas ini terjadi di mana-mana, baik pada level RT, RW, sampai masyarakat bangsa. Dalam kehidupan pluralitas ini, tidak jarang menimbulkan seseorang atau sekelompok warga masyarakat memiliki kecenderungan mementingkan kelompok dan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, kebebasan harus diiringi dengan kesabaran, toleransi dan kemampuan mengendalikan diri.

Pendidikan untuk demokrasi adalah proses sepanjang hayat, hal ini tidak dibatasi pada jenjang atau kelas pendidikan sekolah. Hal ini perlu sifat lintasdisiplin dan meresap ke seluruh proses pendidikan. Pendidikan untuk demokrasi dapat menggunakan banyak pendekatan yang berbeda tergantung pada sistem politik, tradisi sosial budaya dsan sejarah. Misalnya ada model Barat yang

bebas, model sosialis dan model-model yang digunakan oleh beberapa negara Asia dan negara ayang sedang berkembang.



Menurut Unesco (1998:57) terdapat berbagai aspek atau dimensi demokrasi yang dapat digunakan oleh pendidikan untuk demokrasi meliputi hal-hal yang politis, ideologis, filsafati atau konseptual, sejarah, hukum dan legeslatif, budaya, artistik dan susastra. Suatu pendekatan yang selektif digunakan di dalam memilih dari daftar ini, tetapi perhatian khusus hendaknya diberikan pada demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dari semua paguyuban (komunitas).

Di dalam wacana demokrasi telah diakui pentingnya peran agama. Studi-studi menunjukkan bahwa kedudukan agama terhadap proses demokrasi ini sangat licin. Di suatu masa dan tempat ia bisa hadir sebagai pendorong aktif demokratis, tetapi di masa dan tempat yang lain justru bisa merupakan penghambat yang utama. Upaya pengaktifan agama dalam proses demokratisasi menurut Suaedy (2000: 57) dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pada tingkat pertama, biasanya merupakan suatu tataran kritis terhadap nilai-nilai normatif agama yang berkaitan dengan kehidupan publik dan upaya reinterpretasi atasnya. Pada tataran berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai keagamaan ini diinstrumentasikan oleh orang perorangan atau institusi-institusi keagamaan dalam praktek sosial politik sehari-hari.

a. Maksud Pendidikan Demokrasi

Menurut Unesco (1998:57) maksud pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan eksistensi manusia dengan jalan mengilhaminya dengan pengertian martabat dan persamaan, saling mempercayai, toleransi,

penghargaan pada kepercayaan dan kebudayaan orang-orang lain, penghormatan pada individualitas, promosi peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, dan kebebasan ekspresi, kepercayaan dan beribadat. Jika hal-hal ini sudah ada, maka dimungkinkan untuk pengambilan keputusan yang mangkus, demokrasi pada semua tingkatan yang akan mengarah pada kewajaran, keadilan dan perdamaian.

Rosyada (2004:17), berpendapat bahwa sekolah demokratis merupakan sekolah yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokrasi itu terlaksana, seperti pelibatan masyarakat (stateholder dan user sekolah) dalam membahas program-program sekolah dan prosedur pengambilan keputusan juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik.

b. Tujuan Kurikulum Demokrasi

Menurut Unesco (1998:57) tujuan kurikulum demokrasi adalah :

- 1) Meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokratis, berbagai bentuk pemerintahan yang demokratis, lembaga-lembaga politik, demokrasi dalam praktek, dan masalah-masalah demokrasi, khususnya di Asia-Fasifik.
- 2) Menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang mengembangkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Memperkuat tingkah laku demokrasi.

c. Strategi Pengembangan Pendidikan Demokrasi

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi Pengembangan Pendidikan Demokrasi, yaitu :

1. Untuk dapat mengembangkan pendidikan demokrasi, maka suatu aturan demokrasi haruslah berlaku di tempat-tempat pembelajaran, seperti sekolah-sekolah dan kelas-kelas pendidikan luar sekolah. Sedapat

- mungkin, kegiatan-kegiatan pembelajaran hendaklah dilaksanakan dengan cara yang demokratis.
2. Pendidikan untuk demokrasi adalah proses yang berlanjut; secara tepat diperkenalkan disemua jenjang dan semua bentuk pendidikan melalui pendekatan terpadu atau melalui kursus-kursus mata pelajaran khusus.
 3. Penafsiran demokrasi yang kaku dan eksklusif hendaknya dihindari, sehingga secara tetap memperluas perspektif-perspektif demokrasi kita sesuai dengan berbagai konteks sosio-budaya dan ekonomis dan evolusinya.
 4. Kawasan Asia-Fasifik secara budaya kaya dalam musik, seni, susastra, tari-tarian, permainan dan sebagainya. Hal-hal ini hendaknya sedapat mungkin digunakan untuk membuat proses pembelajaran hidup. Adalah juga penting untuk mencari suatu model demokrasi yang ada dan asli di kawasan ini (Unesco, 1998:57-58).

Nilai-nilai demokrasi menurut Cipto, et al (2002:31-37) meliputi:

a). Kebebasan Menyatakan Pendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warganegara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi (Dahl, 1971). Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warganegara dalam era pemerintahan terbuka saat ini. Dalam masa transisi menuju demokrasi saat ini perubahan-perubahan lingkungan politik sosial, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi sering kali menimbulkan persoalan bagi warganegara maupun masyarakat pada umumnya. Jika persoalan tersebut sangat merugikan hak-haknya selaku warganegara atau warganegara berharap agar kepentingannya dipenuhi oleh negara, dengan sendirinya warganegara berhak untuk menyampaikan keluhan tersebut secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah.

Warganegara dapat menyampaikan kepada pejabat seperti lurah, camat, bupati, anggota DPRD/DPR, atau bahkan presiden baik

melalui pembicaraan langsung, lewat surat, lewat media massa, lewat penulisan buku atau melalui wakil-wakilnya di DPRD.

b). Kebebasan Berkelompok

Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warganegara. Kebebasan berkelompok diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari.

Dalam era moderen kebutuhan berkelompok ini semakin kuat tumbuhnya. Persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat yang sedemikian kompleks seringkali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar.

Demokrasi menjamin kebebasan warganegara untuk berkelompok termasuk membentuk partai baru maupun mendukung partai apa pun. Tidak ada lagi keharusan mengikuti ajakan dan intimidasi pemerintah. Demokrasi memberikan alternatif yang lebih banyak dan lebih sehat bagi warganegara. Itu semua karena jaminan bahwa demokrasi mendukung kebebasan kelompok.

c). Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada empat jenis partisipasi.

Pertama, adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR/DPD maupun pemilihan Presiden. Di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia pemberian suara sering dipersepsikan sebagai wujud kebebasan berpartisipasi politik yang paling utama. Pada umumnya negara demokrasi yang baru berkembang senantiasa mengharapkan agar jumlah pemilih atau partisipan dalam pemberian suara dapat mencapai suara sebanyak-banyaknya. Dalam demokrasi sebenarnya tidak ada keharusan untuk memberikan suara dengan cara-cara kekerasan.

Kedua, adalah bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah. Bentuk partisipasi yang kedua ini belum berkembang luas di negara demokrasi baru. Kontak langsung dengan pejabat pemerintah ini akan semakin dibutuhkan karena kegiatan pemberian suara secara reguler (pemilihan anggota DPR/Presiden) dalam perkembangannya tidak akan memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Ini diperlukan oleh negara demokrasi agar sistem politik bekerja lebih baik, Pernyataan protes terhadap kebijakan divestasi bank, privatisasi BUMN, kenaikan harga tarif listrik, telepon dan harga BBM adalah bagian dari proses demokrasi sejauh itu diarahkan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah atau swasta dan tidak untuk menciptakan gangguan bagi kehidupan politik.

Keempat, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari lurah, bupati, walikota, gubernur, anggota DPR hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku.

d). Kesetaraan antar Warga

Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sisi diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warganegara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multi-etnis, multibahasa, multidaerah, dan multiagama. Heterogenitas masyarakat Indonesia seringkali mengundang masalah khususnya bila terjadi miskomunikasi antarkelompok yang kemudian berkembang luas menjadi konflik antarkelompok.

Nilai-nilai kesetaraan perlu dikembangkan dan dilembagakan dalam semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Diperlukan usaha-usaha keras agar tidak terjadi diskriminasi atas kelompok etnis, bahasa, daerah atau agama tertentu sehingga hubungan antarkelompok dapat berlangsung dalam suasana egaliter. Prinsip kesetaraan memberi ruang bagi setiap warganegara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, agama, ras untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan diperlakukan sama di depan hukum tanpa kecuali kedaulatan rakyat.

e). Rasa Percaya (*Trust*)

Rasa percaya antara politisi merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa percaya satu sama lain tidak tumbuh. Bila yang ada adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan maka hubungan antara politisi akan terganggu secara permanen.

Jika rasa percaya tidak ada maka besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan menjalankan agendanya karena lemahnya dukungan sebagai akibat dari kelangkaan rasa percaya. Dalam kondisi seperti ini pemerintah bahkan bisa terguling dengan mudah sebelum waktunya sehingga membuat proses demokrasi berjalan semakin lambat. Konsekuensi dari kebutuhan akan rasa percaya ini masing-masing politisi juga harus mengembangkan rasa percaya terhadap politisi yang lain sehingga timbul hubungan yang didasarkan pada rasa percaya satu sama lain. Bahkan, agar pemerintah dipercaya maka ia pun harus mampu menumbuhkan rasa percaya pada dirinya sehingga tumbuh pula rasa percaya dari masyarakat luas terhadap pemerintah.

f). Kerjasama

Kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama

dalam hal kebajikan. Sebagaimana perintah Allah SWT, "Hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan bakti, dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan (Q.S. Al Maidah: 2, A. Hassan, 1956.:208).

Kerjasama hanya mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu atau antar kelompok.

Kerjasama saja tidak cukup untuk membangun masyarakat terbuka. Diperlukan kompetisi satu sama lain sebagai pendorong bagi kelompok untuk meningkatkan kualitas masing-masing. Kompetisi menuju sesuatu yang lebih berkualitas sangat diperlukan, sementara kerjasama diperlukan bagi kelompok untuk menopang upaya persaingan dengan kelompok lain.

Dalam konteks yang lebih luas kerjasama dan kompetisi dapat menghasilkan persaingan yang sangat ketat sehingga masing-masing kelompok berpotensi untuk saling menjatuhkan bahkan menghancurkan. Diperlukan nilai-nilai kompromi agar persaingan menjadi lebih bermanfaat karena dengan kompromi sisi-sisi agresif dari persaingan dapat diperluas menjadi bentuk kerjasama yang lebih baik.

Demokrasi tidak hanya memerlukan hubungan kerjasama antar individu dan kelompok. Kompetisi, kompromi, dan kerjasama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi (Cipto,2002:40-41 }.

Muhaimin (2002:11), memberikan penjelasan bahwa nilai yang penting dalam demokrasi seperti : kemauan melakukan kompromi, bermusyawarah berdasar asas saling menghargai dan ketundukan kepada *rule of law* yang pada akhirnya dapat menjamin terlindungnya hak asasi tiap-tiap manusia Indonesia. Sehingga kehidupan bersama berlandaskan demokrasi, menurut Zamroni (2001:31) memerlukan :

- 1). Suatu “visi” dan “kode etik” yang dijabarkan secara formal dalam hukum atau undang-undang yang harus dipatuhi oleh warga negara.
- 2). Sistem hukum yang obyektif dan mandiri.
- 3). Sistem pemerintahan yang didasarkan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
- 4). Struktur sosial, politik dan ekonomi yang menjauhi monopoli dan memung kinkan terjadinya mobilitas yang tinggi dan kesempatan yang adil bagi semua warga.
- 5). Kebebasan berpendapat agar ide-ide warga masyarakat dapat diserap oleh pemerintah.
- 6). Kebebasan menentukan pilihan pribadi.

Sikap demokratis dalam penelitian ini adalah sikap demokratis mahasiswa selama di kampus. Khususnya sbagai populasi, yakni mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester gasal tahun akademik 2004-2005, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran PKn.

4. Akhlak

Salah satu tujuan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) adalah menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional kependidikan serta beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT (Panduan Akademik UMP, 2001-2002:17). Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas).

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi) istilah akhlak berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata "khuluq" yang berarti tabiat, watak, perangai, atau budi pekerti (Zahrudin, 1987:57). Pengertian ini sering disinonimkan dengan kata etika, moral, kesusilaan, tata krama atau sopan santun (Halim, 2002 : 8). Dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak "Khaliq" (Tuhan) dengan perilaku makhluk (manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak "Khalik" (Tuhan). Sehingga akhlak bukan sekedar merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekali pun (Ilyas, 2002 : 1).

Akhlak juga diartikan suatu “gerakan” di dalam jiwa seseorang, yang menjadi sumber perbuatannya yang bersifat alternatif-baik atau buruk; bagus atau jelek – sesuai dengan pengaruh pendidikan yang diberikan kepadanya. Apabila jiwa dididik untuk mengutamakan kemuliaan dan kebenaran, mencintai kebajikan, menyukai kebaikan, dilatih untuk mencintai kebaikan dan membenci kejelekan, maka dengan mudah akan lahir darinya perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak sulit baginya untuk melakukan apa yang disebut akhlak baik. Dengan mudah perbuatan-perbuatan baik tersebut akan diikuti dengan akhlak baik seperti malu, murah hati, lemah lembut, sabar, bertanggung jawab, dermawan, berani, adil, berbuat baik, dan segala perbuatan yang mencerminkan kemuliaan akhlak dan kesempurnaan jiwa. Sebaliknya apabila jiwa itu ditelantarkan, tidak dididik dengan semestinya, tidak dibina unsur-unsur baik yang ada padanya, atau apabila jiwa itu dididik dengan tidak semestinya sehingga ia mencintai keburukan dan membenci kebaikan, maka akan muncul darinya perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang hina dan cacat yang disebut sebagai akhlak buruk, seperti khianat, berdusta, rakus, tamak, kasar, keji, kotor, dan sebagainya (El-Jazairi, 1997:147).

a. Macam-macam Akhlak

Secara garis besar, menurut pendapat Mahyuddin (1995:27), akhlak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : a) akhlak yang baik (terpuji) atau *akhlakul mahmudah, akhlakul karimah*, yang mencakup pokok-pokok akhlakul karimah terhadap Allah, akhlakul karimah terhadap sesama manusia, dan akhlakul karimah terhadap makhluk lain; b) akhlak yang buruk (tercela) atau *akhlakul madzumah*.

juga meliputi akhlak buruk kepada Allah, akhlak buruk kepada sesama manusia, dan akhlak buruk terhadap makhluk lain.

Akhlak yang baik akan timbul dari orang yang memiliki keadaan batin (kematangan jiwa) yang baik. Dikarenakan akhlak mengacu pada keadaan batin manusia, maka akhlak yang baik menunjukkan keadaan batin yang baikpula.(Quasem, 1998:82). Orang yang baik akhlaknya adalah orang yang memiliki sifat lapang dada (sabar), ramah, pandai bergaul, tidak menyakiti orang lain, lurus, jujur, benar, sedikit bicara banyak bekerja, sabar dalam perjuangan, tahu terima kasih, dapat dipercaya, tidak memfitnah, tidak hasud, baik dengan sesama, perkataan dan perbuatannya baik, dan sebagainya (Bakry, 1993: 21).

Ilyas (2002: ix-x) membagi akhlak menjadi enam, yaitu akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap Rasulullah SAW, akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga , akhlak bermasyarakat, dan akhlak bernegara. Dalam penelitian ini pendapat terakhir ini yang digunakan sebagai acuan.

b. Peranan Akhlak dalam Kehidupan Manusia

Zahrudin (1987:66), menjelaskan bahwa akhlak merupakan pengendalian dan kontrol setiap perilaku dan sikap manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Apabila setiap orang memiliki akhlak yang buruk, maka di dunia ini tidak akan terwujud kedamaian, ketenteraman, keharmonisan dan ketenangan hidup. Bahkan suatu bangsa dapat mengalami kehancuran karena lenyapnya akhlak dari bangsa itu.

Akhlak juga memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik ia sebagai pribadi maupun manusia dalam suatu kelompok



masyarakat atau bangsa. Begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia sehingga Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dengan salah satu tugas untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, "Dan sesungguhnya engkau diciptakan atas perangai yang besar" (Hassan, 1956:1124). Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan, "Sesungguhnya aku diutus guna menyempurnakan keutamaan akhlak"

Akhlak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, apakah ia sebagai individu, maupun sebagai kelompok dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa, bahkan kehidupan antar bangsa. Akhlak merupakan dasar/fondasi terciptanya kedamaian, ketenteraman, keseimbangan, dan kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Akhlak akan membimbing manusia kepada kesadaran akan pentingnya hidup selaras, harmonis dan serasi dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Oleh karena itu pembentukan akhlak mulia bagi semua manusia, termasuk mahasiswa sangatlah penting dan tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) pada perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu mendidik / mengembangkan mahasiswa maupun masyarakat agar mampu mengeksplorasi nilai-nilai Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat (Cipto, et al, 2002:1).

Akhlak dalam penelitian ini adalah akhlak mahasiswa di kampus, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas

Muhammadiyah Purwokerto semester gasal tahun akademik 2004-2005, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran PKn.

5. Integritas Nasional.

Integritas nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Masalah Integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multi dimensional, bahkan dapat dikatakan belum final sepenuhnya (Ubaidillah at al, 2000 :24).

Munculnya berbagai konflik horizontal serta tuntutan merdeka dari daerah (Aceh, Papua dan Maluku Selatan) memperlihatkan bahwa kita bangsa Indonesia ini sedang menghadapi bahaya disintegrasi nasional dalam tingkat yang cukup parah (Cipto at al, 2002: 167). Masyarakat Majemuk yang mencoba membangun demokrasi secara lebih baik, menurut Makarim (2000:130-131) akan mengalami masa-masa krisis. Masyarakat yang sedang dalam krisis itu biasanya kemudian kehilangan pegangan, rasa percaya dirinya melemah, kepercayaan kepada pemerintah pun menurun tajam.

Menguat dan melemahnya integrasi nasional di Indonesia, menurut Bhakti (1994:25), tidak ditentukan hanya oleh perkembangan politik, pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial budaya di dalam negeri, tetapi juga oleh perkembangan situasi internasional, khususnya di kawasan terdekat, yakni Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis,

yang berdiam di wilayah-wilayah perbatasan memiliki kaitan darah, agama maupun bahasa dengan para penduduk di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Papua Niugini. Perkembangan politik, pertahanan, ekonomi dan sosial budaya negara-negara tetangga tersebut tentunya akan memberi dampak-dampak positif maupun negatif terhadap integrasi nasional Indonesia, seperti di Sumatera Utara/Aceh, Kalimantan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya.

Upaya untuk mewujudkan integrasi nasional menurut Ubaidillah (2000:27), adalah setali tiga uang dengan upaya membangun kesatuan dan peresatuan bangsa. Diperlukan sejumlah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong berbagai macam bentuk perbedaan bangsa ini untuk saling berdialog dan berdampingan hidup secara harmonis. Salah satunya adalah dengan mulai menghentikan penggunaan klasifikasi seperti mayoritas-minoritas, penduduk asli-pendatang, pribumi-non pribumi, lebih-lebih yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan politis. Semua istilah ini hanya memupuk subur sikap dan perilaku kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak berusaha saling memahami latar belakang budaya dan kultur mereka masing-masing, sehingga berbagai prasangka dan stereotip yang ada justru dibiarkan tumbuh dan bahkan terkesan dipelihara oleh masing-masing kelompok.

Tanggapan terhadap pentingnya integritas nasional dalam penelitian ini adalah tanggapan mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester gasal tahun akademik 2004-2005 terhadap pentingnya integrasi nasional dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran PKn.

6. Hak dan Kewajiban Warganegara

Hak dan kewajiban warganegara menurut Soemantri (2001:1) merupakan syarat objektif dalam semua organisasi negara demokratis. Karena itu rakyat-bangsa yang menempati sebuah negara telah mencantumkaninya dalam konstitusi negara. Biasanya antara ketentuan pasal-pasal hak dan kewajiban warganegara dalam konstitusi dengan kenyataannya sedikit atau banyak berbeda. Hal ini terjadi karena tergantung pada kebijakan pemerintah, tingkat kemakmuran, tingkat pelayanan publik, sistem politik, ekonomi, hukum, dan tingkat pendidikan, disiplin budaya bangsa, serta konstelasi dan banyaknya masalah bangsa itu. Karena itu membicarakan hak dan kewajiban warganegara erat hubungannya dengan rasiona Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai matakuliah Pengembangan Kepribadian.

Hak warganegara di negara Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 yaitu (1) sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, (2) hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (3) ikut serta dalam pembelaan negara, (4) hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, (5) mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, (6) ikut serta dalam usaha pertahanan negara, (7) mendapatkan pendidikan, (8) dipelihara negara (khusus fakir miskin dan anak terlantar). Sedangkan kewajiban warganegara di negara Republik Indonesia yang diatur di dalam UUD 1945 meliputi :(1) kewajiban

menjunjung hukum dan pemerintahan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (3) menghormati hak asasi orang lain. (4) tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, (5) ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan (6) mengikuti pendidikan dasar.

Kesadaran hak dan kewajiban warganegara dalam penelitian ini adalah kesadaran mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester gasal tahun akademik 2004-2005 terhadap hak dan kewajibannya sebagai warganegara, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran PKN.

7. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia (Tap. MPRRI No.XVII/MPR/1998 Tentang HAM). Hak asasi manusia (HAM) juga berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM).

Lopa (1999:1) mengartikan HAM cukup singkat, yaitu hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Ubaidillah at al (2000:207) mendefinisikan HAM adalah hak-hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini bersifat

sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia. HAM juga berarti sebagai hak dasar (asasi), yang dimiliki dan melekat pada manusia, karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia (Cipto et al, 2002:127). Budiardjo (1982:120) memberikan pengertian bahwa hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Hak asasi manusia yang termaktub di dalam UUD 1945 cukup banyak, yaitu yang terdapat pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang meliputi : (1) hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan, (2) hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, (3) hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak, (4) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, (5) hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, (6) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan sebagainya.

Di dalam Ketetapan MPRRI No.XXVII/MPR/1998 Tentang HAM, tercantum pula tentang hak asasi manusia yang meliputi: (1) hak untuk hidup, (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (3) hak mengembangkan diri, (4) hak keadilan, (5) hak kemerdekaan, (6) hak atas kebebasan informasi, (7) hak

keamanan, (8) hak kesejahteraan, dan (8) hak perlindungan dan pemajuan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dimuat tentang hak asasi manusia, yang meliputi: (1) hak untuk hidup, (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (3) hak mengembangkan diri, (4) hak memperoleh keadilan, (5) hak atas kebebasan pribadi, (6) hak atas rasa aman, (7) hak atas kesejahteraan, (8) hak turut serta dalam pemerintahan, dan (9) hak khusus bagi wanita, serta (10) hak anak.

Tanggapan mahasiswa terhadap hak asasi manusia dalam penelitian ini adalah tanggapan mahasiswa terhadap hak asasi manusia, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah semester gasal tahun akademik 2004-2005, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran PKn.

8. Prestasi Hasil Belajar

Belajar sering diartikan sebagai proses perubahan pada diri seseorang. Ali (1996:14) mengartikan belajar sebagai proses perubahan perilaku individu sebagai akibat interaksinya dengan lingkungan. Belajar juga merupakan perubahan perilaku atau penampilan seseorang dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mendengar, mengamati dan sebagainya (Sardiman, 1994:22). Sedangkan prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari usaha belajar. Atau penguasaan pengetahuan atau ketrampilan tertentu yang dikembangkan melalui mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai yang diberikan oleh guru (Depdiknas, 2001:985).

Prestasi belajar juga merupakan hasil dari belajar yang nampak pada tingkah laku siswa sebagai akibat dari belajar. Jadi merupakan bukti keberhasilan yang dinyatakan dengan adanya perubahan tingkah laku yang nyata. Misalnya seorang siswa yang tadinya tidak dapat menulis kalimat dengan huruf latin, setelah belajar dapat menulis kalimat dengan huruf latin (Winkel, 1986:48). Sedangkan Hasan (1990:54) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh matapelajaran yang lazim ditunjuk dengan angka tes atau angka nilai.

Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah prestasi hasil belajar PKn mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Kimia Fakultas teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto semester gasal tahun akademik 2004-2005, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran PKn. Prestasi hasil belajar PKn ini meliputi rata-rata dari hasil ujian tengah semester (bobot 1), hasil tugas terstruktur(bobot 1), dan hasil ujian akhir semester (bobot 2).Ujian tengah semester dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2004, yang materinya terdiri dari : 1) Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, 2) Pendidikan Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani, 3) nilai-nilai Demokrasi, 4)- Pemerintahan yang bersih dan demokratis, dan 5) Transformasi nilai Demokrasi. Soal terdiri dari lima soal, yang masing-masing terdiri dari dua soal, jadi ada sepuluh soal. Bobot masing-masing soal sama, yaitu sepuluh.

Tugas terstruktur, merupakan tugas kepada mahasiswa berupa laporan buku dan portofolio. Buku yang dipilih untuk dilaporkan hendaknya ada kaitannya dan menunjang matakuliah PKn. Dalam laporan buku ini mahasiswa diharuskan

merumuskan isi pokok pemikiran pengarang buku yang dilaporkan, serta memberikan komentar terhadap isinya. Rumusan isi pokok meliputi permasalahan yang diajukan pengarang, cara pengarang menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan yang diajukan, konsep dan teori yang dikembangkan dalam buku, serta kekhasan pendapat pengarang. (Universitas Pendidikan Indonesia, 2000:9).

Jadi ada dua hal pokok yang dinilai untuk laporan buku ini, yaitu : merumuskan isi pokok pemikiran pengarang buku dengan bobot 50 , dan komentar terhadap isi buku dengan bobot juga 50. Sedangkan portofolio yang merupakan tugas terstruktur ini berupa tugas kepada mahasiswa untuk membuat koleksi, terutama tulisan-tulisan mahasiswa dan bisa juga kliping surat kabar / majalah / internet, laporan tertulis hasil wawancara dengan anggota masyarakat, laporan tertulis ulasan dari radio / televisi, catatan hasil komunikasi dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat, petikan dari sejumlah publikasi pemerintah, tentang tema-tema tertentu, selama satu semester. Kelompok eksperimen maupun kontrol dibagi menjadi sembilan kelompok, sehingga terdapat sembilan tema pula dalam portofolio ini. Tema disesuaikan dengan materi buku ajar, yaitu : 1) Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, 2) PKN dan masyarakat madani, 3) nilai-nilai demokrasi (tinjauan umum), 4) Pemerintahan yang bersih dan demokratis, 5) Transformasi nilai demokrasi dalam keluarga dan masyarakat, 6) Identitas Nasional, 7) Tata dunia baru dalam globalisasi, 8) Ekonomi kerakyatan, dan 9) penegakan HAM.. Penilaian portofolio ini di dasarkan pada dua hal yaitu kualitas karangan/karya mahasiswa

sesuai dengan tema dan kesempurnaan portofolio, yang masing-masing berbobot 50.

Ujian akhir semester dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2005, yang materinya terdiri dari: 1) Transformasi Nilai Demokrasi dalam keluarga dan Masyarakat, 2) Membangun Identitas Nasional, 3) Tata Dunia Baru dalam Globalisasi, 4) Ekonomi Kerakyatan dan Etos Ekonomi sebagai Basis Kekuatan Nasional dan 5) Penegakan Hak Asasi Manusia. Soal terdiri dari lima soal, yang masing-masing terdiri dari dua soal, sehingga ada sepuluh soal, bobot masing-masing soal sama, yaitu 10.

Secara keseluruhan masalah yang diteliti dalam penelitian ini meliputi keseluruhan komponen perubahan sikap, perilaku termasuk pula hasil belajar tertulis. Secara rinci, meliputi : tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran PKn, sikap demokratis mahasiswa, akhlak mahasiswa, tanggapan mahasiswa terhadap pentingnya integrasi nasional, kesadaran mahasiswa terhadap hak dan kewajibannya sebagai warganegara, tanggapan mahasiswa terhadap hak asasi manusia, dan prestasi hasil belajar PKn. Sedangkan cara pengukurannya ada yang dengan menggunakan angket berupa skala sikap, observasi dan tes tertulis, disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan, bahwa yang akan dianalisis perbedaannya antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol meliputi : 1) tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran PKn, 2) sikap demokratis mahasiswa, 3) akhlak mahasiswa, 4) tanggapan mahasiswa terhadap pentingnya integrasi nasional, 5) kesadaran hak dan kewajiban mahasiswa sebagai

warganegara, 6) tanggapan mahasiswa terhadap HAM, 7) prestasi hasil belajar mahasiswa dalam matakuliah PKn, yang terdiri dari tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

